

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, salah satu pengelompokan hutan berdasarkan fungsinya adalah hutan konservasi. Hutan konservasi merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi dibedakan menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Perbedaan mendasar antara KSA dan KPA adalah dalam hal pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Pengelompokan kawasan yang termasuk dalam KSA dan KPA diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa salah satu kawasan hutan yang termasuk dalam KSA adalah Cagar Alam (CA). Cagar alam ditetapkan karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Sedangkan menurut Hardjosoemantri (1993), sesuai dengan karakteristik kawasan konservasi maka sasaran utama penetapan kawasan ini adalah untuk melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar proses-proses ekologi di dalamnya dapat

berlangsung secara terus menerus, serta mempertahankan produksi dan jasa bagi kepentingan manusia secara berkelanjutan. Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ini merupakan upaya memadukan kegiatan perlindungan dengan kebijakan pembangunan. Pemerintah mengupayakan penyusunan aturan dan kebijakan sedemikian rupa yang mengutamakan aspek perlindungan tanpa mengabaikan kebutuhan dan kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya serta pembangunan pemerintah daerah setempat.

Pada kenyataannya, memadukan kegiatan perlindungan dengan kebijakan pembangunan tersebut tidaklah mudah. Banyak langkah-langkah ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya justru menstimulasi penduduk untuk menguasai sumber daya alam dan ingin memiliki kawasan konservasi. Tidak hanya itu, perbedaan kewenangan dan kepentingan antara pemangku kawasan (pemerintah pusat) dengan pemerintah daerah sering memicu terjadinya konflik. Dari satu sisi pemangku kawasan ingin mempertahankan kawasan konservasi sesuai fungsinya, sementara itu di sisi lain pemerintah daerah ingin melaksanakan pembangunan yang justru akan mengancam keberadaan kawasan konservasi. Pemerintah daerah selama ini dihadapkan pada paradigma indikasi kemajuan pembangunan daerah yang bertumpu hanya pada peningkatan ekonomis, non ekonomis dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh sebab itu konteks pembangunan yang menjaga kelestarian alam dan lingkungan tidak menjadi prioritas (Marfai, 2005). Pada akhirnya, kerusakan dan gangguan terhadap kawasan konservasi menjadi hal yang tidak dapat dielakkan lagi.

Di Provinsi Bengkulu, terdapat 25 (dua puluh lima) kawasan Cagar Alam yang tersebar di 9 (sembilan) Kota/Kabupaten. Satu-satunya Cagar Alam yang terdapat di Kota Bengkulu yang merupakan ibukota Provinsi Bengkulu adalah Cagar Alam Danau Dusun Besar (CA DDB). Kawasan CA DDB pertama kali ditunjuk sebagai kawasan konservasi sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda melalui Bisluit Gubernur Hindia Belanda Stb 1936. Di CA DDB itu sendiri, gangguan dan ancaman terhadap kawasan telah menimbulkan perubahan ekologis dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Kerusakan lebih parah juga dipicu oleh beberapa kebijakan pembangunan daerah. Adanya tumpang tindih kepentingan antar sektoral terhadap kawasan ini tidak dapat diatasi dengan mudah, yang terjadi justru ego sektoral lebih mendominasi kebijakan pembangunan yang dikeluarkan. Akibat dari semua ini, masyarakat yang idealnya menjadi pelaku pembangunan justru menjadi korban kebijakan pembangunan. Kawasan CA DDB yang diharapkan menjadi penopang sistem penyangga kehidupanpun mulai menjadi ancaman keberlangsungan hidup masyarakat (BKSDA Bengkulu, 2009).

Secara umum, kawasan CA DDB memiliki manfaat ekologis dan ekonomis bagi masyarakat di sekitar kawasan. Secara khusus, keberadaan DDTS juga tidak kalah penting karena memberikan manfaat ekonomis yang langsung dirasakan masyarakat sekitar. Manfaat tersebut antara lain sebagai sumber pengairan/irigasi ratusan hektar sawah petani yang ada di sekitarnya, sebagai tempat mencari ikan bagi para nelayan, dan sebagai tempat berjualan di sekitar danau bagi pedagang karena banyaknya masyarakat yang datang berekreasi melihat pemandangan DDTS ini. Jika kawasan ini rusak maka akan berdampak

kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Perubahan ekosistem DDTs menyebabkan pasokan air untuk irigasi persawahan tidak stabil, yaitu pada musim kemarau berkurang dan pada musim hujan berlebihan. Ancaman bagi petani adalah menurunnya produktivitas lahan sawah bahkan bisa gagal panen. Penurunan kualitas DDTs mempengaruhi populasi ikan di danau dan berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi nelayan. Begitu juga dengan penumpukan sedimen yang menyebabkan pendangkalan danau dan pencemaran air mengakibatkan populasi ikan menurun dan penghasilan nelayan menjadi berkurang. Selain itu, penurunan atau kehilangan populasi jenis tumbuhan tertentu di ekosistem ini mengurangi daya tarik masyarakat yang akan berkunjung menikmati pemandangan. Hal ini mempengaruhi pendapatan masyarakat yang berjualan di sekitar DDTs.

Kondisi kawasan saat ini dan masa yang akan datang juga ditentukan oleh persepsi dan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan CA DDB. Hal ini telah diteliti sebelumnya dan hasil penelitian Jauhari (2014) menunjukkan bahwa tingkat persepsi masyarakat dalam pengelolaan CA DDB rata-rata 74,54% dengan kriteria positif. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan CA DDB rata-rata 50,34% dengan kriteria sedang. Hal ini mengandung arti bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang cagar alam, namun partisipasi mereka belum begitu tinggi. Persepsi dan partisipasi ini ditunjukkan oleh masyarakat desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan kawasan CA DDB.

Desa/kelurahan yang berbatasan langsung dan berada di sekitar kawasan konservasi disebut desa penyangga kawasan. Desa penyangga ini tentu saja ada

yang berada di hulu dan ada yang berada di hilir kawasan. Penelitian masyarakat desa penyangga kawasan selama ini hanya dilakukan pada desa/kelurahan yang berbatasan langsung saja. Penelitian belum pernah dilakukan pada desa/kelurahan lain yang berada di sekitarnya yang juga merasakan dampak keberadaan kawasan CA DDB. Padahal menurut Marfai (2005), perspektif pengelolaan hutan sebagai sumber daya alam adalah ekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif. Di kawasan CA DDB ini misalnya, kelurahan yang berada di bagian hilir DDTs adalah Kelurahan Surabaya, dan Kelurahan Semarang yang berada di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu. Kelurahan Surabaya secara administratif berbatasan langsung dengan kawasan CA DDB, sedangkan Kelurahan Semarang tidak berbatasan langsung. Akan tetapi petani di kelurahan tersebut memanfaatkan air yang berasal dari DDTs sebagai sumber pengairan/irigasi sawah mereka. Oleh sebab itu kedua kelurahan ini akan sama-sama menerima dampak dari kerusakan kawasan cagar alam.

Berdasarkan kerangka *Sustainable Livelihood*, kerusakan kawasan CA DDB merupakan salah satu konteks kerentanan, perubahan struktur dan proses dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mempengaruhi aset penghidupan petani yang tergambar dalam aspek sosial ekonomi petani. Keberagaman aspek sosial ekonomi petani akan mengelompokkan petani-petani yang ada berdasarkan karakteristik yang serupa yang disebut dengan tipologi petani. Pada akhirnya, masing-masing petani memiliki strategi penghidupan untuk bertahan hidup dalam menghadapi kerentanan, perubahan struktur dan proses yang terjadi akibat dampak kerusakan kawasan CA DDB.

Sejauh ini, seberapa besar dampak kerusakan kawasan CA DDB terhadap kehidupan petani di bagian hilir kawasan belum pernah diteliti. Keragaman aspek sosial ekonomi petani menjadi bagian dari aset penghidupan yang mempengaruhi strategi penghidupan mereka untuk tetap bertahan hidup. Sementara itu perencanaan pembangunan daerah dan berbagai konflik terus terjadi dan sangat mengancam kelestarian kawasan CA DDB. Jika data empiris tidak tersedia, maka tidak ada juga pertimbangan yang valid dalam pengambilan kebijakan. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Meskipun sudah menjadi kawasan konservasi selama hampir 80 (delapan puluh) tahun, namun CA DDB tidak dapat dipertahankan, dijaga, dan dilindungi dari berbagai kerusakan. Kerusakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan masyarakat saja, namun juga disebabkan oleh pemerintah daerah yang berwenang secara administratif dan pemerintah pusat yang berwenang dalam pengelolaan kawasan. Penelitian mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan CA DDB telah dilakukan oleh Tashori (2014), hasilnya menunjukkan bahwa penyebab kerusakan CA DDB adalah perambahan liar oleh masyarakat setempat, pencemaran lingkungan, pembukaan jalan poros di dalam kawasan CA oleh pemerintah daerah setempat, pembangunan sarana pariwisata, pemanfaatan CA untuk pertanian dan perkebunan, rendahnya kesadaran dan tingkat pengetahuan masyarakat, rendahnya pendidikan masyarakat, rendahnya intensitas monitoring (pemantauan) dan sosialisasi oleh instansi yang berwenang.

Kerusakan CA DDB akan memberikan efek yang besar terhadap ekosistem DDTs. Secara umum, efek yang ditimbulkan adalah perubahan terhadap air danau karena air berhubungan erat dengan fungsi cagar alam itu sendiri. Pada UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah diuraikan bahwa fungsi pokok cagar alam adalah sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan beserta ekosistemnya dan sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan. Penjelasan pasal 5 atas UU tersebut menyampaikan tentang perlindungan sistem penyangga kehidupan yang meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain. Jika kawasan cagar alam rusak, maka ketersediaan air sebagai salah satu penyangga kehidupan menjadi terganggu.

Hubungan antara hutan dan vegetasi dengan debit air juga dijelaskan oleh Soemarwoto (2001) yang menambahkan bahwa debit air danau dipengaruhi oleh kondisi hutan dan vegetasi di sekitarnya. Jika *illegal logging* dan perambahan hutan terjadi di CA DDB, maka sudah tentu pasokan air DDTs menjadi kurang. Sementara itu kondisi lebih diperburuk lagi dengan pembangunan jalan di dalam kawasan dan pembangunan pemukiman di sekitar kawasan menyebabkan berkurangnya daya resapan tanah karena permukaan tanah yang kedap air terus bertambah. Hal ini sesuai dengan penelitian Purba (2010) yang mengkaji dampak perumahan di sekitar kawasan CA DDB terhadap kelestarian DDTs. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan kawasan perumahan mengakibatkan dampak

berkurangnya jumlah pasokan air ke dalam kawasan tangkapan air CA, munculnya sumber limbah pada daerah yang sangat dekat dengan kawasan tangkapan air, dan adanya pengaruh perubahan vegetasi asli kawasan tangkapan air CA. Namun dampak yang dihasilkan masih dapat dikategorikan sangat kecil, sehingga belum merusak keseimbangan lingkungan pada kawasan tangkapan air CA DDB. Berbeda dengan saat ini, dimana pada tahun 2010 hanya terdapat 3 (tiga) perumahan dan sekarang sudah terdapat 7 (tujuh) perumahan di sekitar CA DDB ini.

Dari waktu ke waktu, kerusakan lingkungan semakin bertambah. Hal ini dibenarkan oleh Soemarwoto (2001) yang menyatakan bahwa kerusakan lingkungan menunjukkan kecenderungan yang semakin memburuk, sehingga dampak terhadap kondisi sosial ekonomi juga menjadi berat. Pada dasarnya semua masyarakat merasakan kerugian, namun ironinya kerugian tersebut lebih banyak dan lebih besar ditanggung oleh masyarakat tingkat bawah. Dukungan dari pemerintahpun sulit diperoleh karena komitmen pemerintah pada pembangunan yang ramah lingkungan tidak jelas.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Nasution (2010) yang menyebutkan bahwa kerusakan hutan akan berdampak negatif bagi kehidupan di sekitarnya, kehidupan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat desa penyangga. Disadari atau tidak, kondisi CA DDB sudah mengalami kerusakan dan kondisi DDTs mengalami penurunan kualitas dan kuantitas air. Perubahan kondisi ini mengancam terpenuhinya kebutuhan pengairan/irigasi sawah masyarakat, menimbulkan perubahan kegiatan pertanian masyarakat secara khusus dan perubahan penghidupan masyarakat secara umum. Untuk menghadapi semua ini,

petani memiliki strategi bertahan hidup yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masing-masing.

Berdasarkan latar belakang dan uraian sebelumnya, maka permasalahan umum yang akan diteliti adalah kehidupan masyarakat petani yang memanfaatkan DDTS sebagai sumber pengairan/irigasi sawah. Sedangkan permasalahan khusus yang dikaji dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kondisi kerusakan kawasan CA DDB saat ini dan apa penyebab kerusakannya?
- 2) Bagaimana dampak kerusakan kawasan CA DDB terhadap penghidupan petani di sekitar DDTS ditinjau dari keragaman sosial ekonomi petani di sekitar DDTS tersebut?
- 3) Kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi dan menjaga kelestarian CA DDB, serta meningkatkan kehidupan petani di sekitar DDTS?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk melihat kehidupan masyarakat petani yang memanfaatkan DDTS sebagai sumber pengairan/irigasi sawah dan dampak kerusakan kawasan CA DDB terhadap penghidupan petani. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk :

- 1) Mendeskripsikan kondisi kerusakan kawasan CA DDB saat ini dan penyebab kerusakannya.

- 2) Mendeskripsikan dampak kerusakan kawasan CA DDB terhadap penghidupan petani berdasarkan keragaman sosial ekonomi petani di sekitar DDTS.
- 3) Memberikan usulan kebijakan untuk memperbaiki kondisi dan menjaga kelestarian CA DDB, serta meningkatkan kehidupan petani di sekitar DDTS.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, metodologi, dan kebijakan, yaitu:

- 1) Manfaat secara teoritis, yaitu dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi dasar referensi bagi penelitian selanjutnya.
- 2) Manfaat secara metodologi, yaitu memperkaya penelitian dan memberikan bukti empiris tentang kehidupan sosial ekonomi petani di sekitar DDTS.
- 3) Manfaat kebijakan, yaitu dapat menjadi acuan dan pertimbangan dalam menyusun perencanaan dan kebijakan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk memperbaiki kondisi dan menjaga kelestarian CA DDB, serta meningkatkan kehidupan petani di sekitar DDTS.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kawasan CA Danau Dusun Besar beserta masyarakat petani di 2 kelurahan penyangga kawasan yang pengolahan

sawahnya bergantung pada sistem pengairan/irigasi dari Danau Dendam Tak Sudah.

Penelitian dilakukan untuk menganalisis strategi bertahan hidup petani yang memanfaatkan DDTS di bawah ancaman penurunan produktivitas lahan sawah sebagai dampak dari kerusakan kawasan CA DDB. Oleh sebab itu, fokus penelitian ini adalah kondisi kerusakan kawasan saat ini, karakteristik sosial ekonomi petani, karakteristik bertani, masalah dan kendala yang dihadapi petani dalam melakukan aktivitas pertaniannya, pandangan petani terhadap penyebab kerusakan dan konflik yang terjadi, serta harapan dan saran petani untuk masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis dilakukan secara sistematis untuk mempermudah penyusunan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai isi tesis dan batasan masalah penelitian. Adapun sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Literatur

Bab ini terdiri dari berbagai tinjauan kepustakaan yang mendukung penelitian, penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya, kerangka teori dan kerangka pikir penelitian. Bab ini merupakan dasar perbandingan antara hasil penelitian

yang diperoleh dengan tinjauan kepustakaan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, definisi operasional variabel, dan matriks data set penelitian.

Bab IV. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Bab ini berisi gambaran umum dan uraian mengenai daerah dan objek penelitian yang dilakukan.

Bab V. Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan yang mengacu pada perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Kajian mendalam dilakukan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dengan berpedoman pada teori, konsep, tinjauan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Bab ini juga berisi uraian tentang usulan kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi dan menjaga kelestarian CA DDB, serta meningkatkan penghasilan petani di sekitar DDTs.

Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah itu disampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada pihak terkait sehubungan dengan upaya perbaikan kawasan CA DDB, pembangunan Pemda Kota Bengkulu, dan kehidupan petani di sekitar DDTs.